

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Krisis iklim telah menjadi salah satu tantangan utama dalam tata kelola kota karena dampaknya berkaitan dengan keberlanjutan lingkungan, kualitas hidup masyarakat, dan arah pembangunan kota. Jakarta sebagai pusat ekonomi dan politik nasional menghadapi berbagai tekanan ekologis yang semakin kompleks, mulai dari peningkatan polusi udara, ancaman banjir, penurunan muka tanah, hingga risiko kenaikan muka air laut. Persoalan tersebut berkaitan dengan bagaimana kota dikelola, bagaimana risiko lingkungan dihadapi, serta bagaimana masyarakat terdampak oleh perubahan kondisi ekologis yang terjadi. Perubahan kondisi lingkungan tersebut memiliki konsekuensi yang berbeda bagi setiap kelompok masyarakat karena tingkat kerentanan dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan kemampuan adaptasi yang dimiliki.

Kelompok masyarakat yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap lingkungan sekitar serta keterbatasan akses terhadap sumber daya adaptasi menghadapi risiko yang lebih besar ketika terjadi perubahan kondisi ekologis. Masyarakat pesisir, kelompok berpenghasilan rendah, dan komunitas yang tinggal di wilayah dengan tekanan lingkungan tinggi menjadi kelompok yang rentan mengalami dampak perubahan iklim. Situasi tersebut berkaitan dengan persoalan keadilan iklim yang membahas distribusi dampak lingkungan, akses masyarakat terhadap perlindungan ekologis, serta keterlibatan warga dalam menentukan arah pengelolaan ruang hidup. Pengalaman kelompok masyarakat yang terdampak kemudian menjadi bagian penting dalam pembentukan tuntutan terhadap kebijakan lingkungan yang lebih responsif. Salah satu pengalaman masyarakat yang berkaitan

dengan persoalan tersebut dapat ditemukan pada wilayah pesisir Jakarta, khususnya masyarakat Pulau Pari di Kepulauan Seribu.

Pulau Pari merupakan salah satu wilayah pesisir Jakarta yang memiliki keterkaitan erat antara kondisi lingkungan dan keberlanjutan kehidupan masyarakat. Sebagai wilayah pulau kecil, masyarakat Pulau Pari memiliki ketergantungan terhadap ekosistem pesisir yang mendukung aktivitas perikanan, budidaya laut, dan pengembangan wisata berbasis masyarakat. Perubahan kondisi lingkungan seperti abrasi, kenaikan muka air laut, dan perubahan ekosistem pesisir memengaruhi ruang hidup serta aktivitas ekonomi warga. Kondisi tersebut berlangsung bersamaan dengan dinamika pengelolaan wilayah pesisir yang melibatkan berbagai kepentingan terhadap ruang di Pulau Pari.

Dinamika pengelolaan ruang di Pulau Pari berkembang menjadi persoalan yang berkaitan dengan keberlanjutan ruang hidup masyarakat. Sejumlah wilayah di pulau tersebut mengalami perubahan klaim kepemilikan dan pemanfaatan ruang yang melibatkan aktor di luar komunitas yaitu PT. Bumi Pari Asri (PT.BPA). Kondisi tersebut menimbulkan ketegangan antara masyarakat yang telah lama bergantung pada wilayah pesisir dengan kepentingan ekonomi yang memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya administratif dan hukum. Bagi masyarakat Pulau Pari, ruang hidup memiliki nilai sosial dan ekonomi yang berkaitan dengan aktivitas sehari-hari, penghidupan masyarakat, serta keberlanjutan ekosistem pesisir. Pengalaman tersebut mendorong masyarakat Pulau Pari untuk membangun berbagai bentuk respons kolektif dalam mempertahankan ruang hidup dan menyuarakan tuntutan terhadap pengelolaan wilayah pesisir yang lebih berkeadilan.

Warga melakukan pengorganisasian melalui jaringan masyarakat, penyampaian aspirasi kepada lembaga pemerintah, serta kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil untuk memperjuangkan keberlanjutan ruang hidup mereka. Proses tersebut membentuk pemahaman bersama di antara warga bahwa persoalan lingkungan yang mereka hadapi berkaitan dengan kepentingan bersama sebagai komunitas yang bergantung pada wilayah pesisir. Perjuangan masyarakat Pulau Pari kemudian berkembang sebagai bagian dari upaya memperoleh pengakuan terhadap hak masyarakat lokal dalam pengelolaan ruang dan lingkungan. Pengalaman masyarakat Pulau Pari menjadi salah satu contoh bagaimana kelompok masyarakat terdampak membangun respons terhadap persoalan lingkungan yang memengaruhi ruang hidup mereka. Persoalan serupa juga muncul pada masyarakat yang menghadapi tekanan lingkungan akibat aktivitas industri.

Selain masyarakat pesisir, kelompok masyarakat Jakarta lain dengan kondisi sosial ekonomi yang lebih rentan juga menghadapi dampak lingkungan akibat aktivitas industri. Salah satu contoh terlihat pada warga Rusunawa Marunda di Jakarta Utara yang mengalami paparan debu batu bara dari aktivitas bongkar muat dan penyimpanan (*stockpile*) batu bara oleh PT. Karya Citra Nusantara (KCN) Marunda. Kondisi tersebut memengaruhi kualitas lingkungan permukiman serta aktivitas sehari-hari masyarakat, termasuk kesehatan, kegiatan pendidikan, dan kenyamanan hidup warga. Situasi yang dialami masyarakat Marunda memperlihatkan bagaimana aktivitas ekonomi industri dapat menghasilkan risiko lingkungan yang dirasakan langsung oleh komunitas yang berada di sekitarnya.

Menghadapi kondisi tersebut, masyarakat Rusunawa Marunda membangun berbagai bentuk respons melalui pengorganisasian warga dan keterlibatan dengan jaringan masyarakat sipil. Warga membentuk Forum Masyarakat Rusunawa Marunda (FMRM), melakukan pengaduan kepada lembaga terkait, serta menjalin kerja sama dengan organisasi seperti Greenpeace Indonesia, LBH Jakarta, WALHI Jakarta, dan kelompok masyarakat sipil lainnya. Upaya tersebut menjadi bagian dari proses masyarakat dalam menyampaikan pengalaman lingkungan yang mereka hadapi dan mendorong adanya perhatian terhadap persoalan pencemaran di kawasan tempat tinggal mereka.

Pengalaman masyarakat Pulau Pari dan Marunda memperlihatkan beragam bentuk kerentanan lingkungan yang dihadapi masyarakat Jakarta. Masyarakat Pulau Pari menghadapi tekanan terhadap ruang hidup pesisir yang berkaitan dengan keberlanjutan ekosistem dan pengelolaan wilayah, sementara masyarakat Marunda menghadapi persoalan kualitas lingkungan akibat aktivitas industri di sekitar permukiman. Kedua pengalaman tersebut menunjukkan bahwa persoalan lingkungan Jakarta memiliki keterkaitan dengan kondisi sosial masyarakat, akses terhadap ruang, serta kemampuan kelompok terdampak dalam menyuarakan kepentingannya. Kondisi ini kemudian menjadi bagian dari isu keadilan iklim yang dibawa oleh berbagai aktor masyarakat sipil dalam mendorong perubahan kebijakan lingkungan. Salah satu aktor masyarakat sipil yang aktif membawa isu keadilan iklim dalam ruang publik adalah Greenpeace Indonesia.

Sebagai organisasi lingkungan yang aktif melakukan advokasi terkait perubahan iklim dan perlindungan lingkungan, Greenpeace Indonesia mengembangkan berbagai strategi untuk mendorong perhatian publik serta

kebijakan yang lebih responsif terhadap persoalan ekologis. Menjelang Pilkada DKI Jakarta 2024, Greenpeace Indonesia mengangkat isu ketahanan iklim sebagai bagian dari agenda politik daerah melalui produksi riset, penyusunan rekomendasi kebijakan, kampanye publik, serta keterlibatan dengan berbagai aktor politik.

Melalui laporan “Keadilan Iklim untuk Jakarta Berketahanan”, Greenpeace Indonesia menyusun sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan persoalan lingkungan di perkotaan, seperti polusi udara, perlindungan wilayah pesisir, transportasi berkelanjutan, pengelolaan sampah, serta peningkatan ketahanan kota terhadap dampak perubahan iklim. Laporan tersebut menjadi instrumen advokasi untuk membawa pengalaman masyarakat terdampak ke dalam ruang kebijakan dan mendorong calon pemimpin daerah memberikan perhatian terhadap isu lingkungan dalam agenda Pilkada DKI Jakarta 2024.

Momentum Pilkada DKI Jakarta 2024 menjadi ruang strategis bagi Greenpeace Indonesia untuk membawa isu lingkungan ke dalam pembahasan politik daerah. Melalui laporan dan rekomendasi kebijakan yang telah disusun, Greenpeace Indonesia melakukan berbagai upaya advokasi dengan menyampaikan tuntutan kepada penyelenggara pemilu dan pasangan calon gubernur serta wakil gubernur. Keterlibatan tersebut diarahkan untuk mendorong agar persoalan seperti polusi udara, perlindungan pesisir, ruang terbuka hijau, transportasi berkelanjutan, dan ketahanan iklim memperoleh perhatian dalam agenda politik kandidat.

Selain melalui jalur institusional, Greenpeace Indonesia juga menggunakan ruang publik dan ruang digital sebagai bagian dari strategi advokasi lingkungan. Aksi kreatif, kampanye media sosial, petisi daring, serta produksi konten digital menjadi sarana untuk memperluas percakapan mengenai krisis iklim Jakarta.

Berbagai aktivitas tersebut melibatkan masyarakat terdampak, relawan, dan jaringan organisasi masyarakat sipil dalam menyuarakan tuntutan mengenai perlindungan lingkungan dan keadilan iklim. Perkembangan strategi advokasi melalui ruang digital tersebut didukung dengan perubahan cara masyarakat berpartisipasi dalam isu publik. Kehadiran internet dan media sosial telah memperluas ruang keterlibatan masyarakat dalam membicarakan, menyebarkan, dan mengorganisasi berbagai persoalan sosial maupun lingkungan.

Sejalan dengan hal itu, kehadiran internet dan media sosial membentuk ruang partisipasi baru bagi masyarakat dalam isu politik dan lingkungan. Media digital berkembang sebagai ruang penyebaran informasi, interaksi, konsolidasi, dan mobilisasi kolektif. (Lim, 2006) menjelaskan bahwa aktivisme digital di Indonesia dapat berkembang sebagai *cyber-urban activism*, yaitu aktivisme yang menghubungkan ruang daring dengan dinamika politik dan sosial. Media sosial memungkinkan terbentuknya jejaring solidaritas yang cair, cepat, dan lintas batas geografis, sehingga isu dapat memperoleh perhatian publik yang lebih luas. Oleh karena itu, internet menjadi medium strategis bagi organisasi masyarakat sipil untuk memperluas jangkauan advokasi dan membangun tekanan publik terhadap pengambil kebijakan.

Berbagai aktivitas advokasi yang dilakukan Greenpeace Indonesia menunjukkan bahwa gerakan lingkungan terbentuk melalui proses sosial yang melibatkan hubungan antara organisasi, masyarakat terdampak, dan partisipan kampanye. Keterlibatan berbagai aktor dalam gerakan tersebut berkaitan dengan bagaimana suatu persoalan lingkungan dimaknai secara bersama, bagaimana masyarakat mengidentifikasi adanya ketidakadilan, serta bagaimana muncul

keyakinan bahwa tindakan kolektif dapat menghasilkan perubahan. Proses tersebut menjadi penting untuk memahami bagaimana sebuah isu lingkungan berkembang menjadi gerakan sosial dalam ruang publik. Untuk memahami proses terbentuknya keterlibatan kolektif tersebut, diperlukan pendekatan yang dapat menjelaskan proses terhadapnya gerakan sosial tersebut dengan menggunakan *Social Identity Model of Collective Action* (SIMCA).

Social Identity Model of Collective Action (SIMCA) digunakan dalam penelitian ini untuk memahami proses psikologis yang mendasari terbentuknya aksi kolektif dalam advokasi lingkungan. Model ini menjelaskan bahwa partisipasi dalam gerakan sosial berkaitan dengan tiga elemen utama, yaitu identitas sosial, persepsi terhadap ketidakadilan, dan keyakinan terhadap efektivitas tindakan bersama (van Zomeren et al., 2008). Melalui perspektif tersebut, penelitian ini melihat bagaimana pengalaman masyarakat terdampak, narasi keadilan iklim, serta strategi advokasi Greenpeace Indonesia membentuk keterlibatan kolektif dalam momentum Pilkada DKI Jakarta 2024.

Membahas mengenai SIMCA sebagai analisis terhadap suatu gerakan sosial juga diteliti oleh Dhia, Nuken, dkk, (2025) yang menjelaskan bahwa gerakan yang didasari oleh sebuah *hashtag* atau tagar yang bernama #IndonesiaGelap merupakan bentuk ekspresi dari ketidakpuasan masyarakat atas kebijakan pemerintah. Di Samarinda, gerakan-gerakan sosial secara *offline* mengenai #IndonesiaGelap terjadi karena ekspresi dan moral yang beredar di media sosial berkontribusi pada pembentukan identitas kolektif dunia maya yang kemudian terakumulasi menghadirkan massa untuk melakukan tindakan kolektif dalam bentuk *offline*.

Ketidakadilan sebagai gerakan sosial juga ditemukan pada aksi kamisan. Hal itu diteliti oleh Bambang dan Yumalaksami (2021) yang mengungkapkan bahwa aksi kamisan merupakan bentuk baru sebuah gerakan sosial dalam bentuk *silent protest* yang mana setiap hari kamis, massa dan keluarga korban hadir di depan gedung istana negara untuk menuntut keadilan bagi mereka yang hilang pada masa demo tahun 1998. Seiring berjalannya waktu, keluarga korban dan massa sepakat membentuk komunitas bernama Jaringan Soildaritas Korban untuk Untuk Keadilan (JSKK). Walaupun aksi kamisan membahas mereka yang hilang pada tahun 1998, sesekali pengurus JSKK menyisipkan bentuk ketidakadilan-ketidakadilan lainnya untuk mengundang massa di luar JSKK untuk meningkatkan *public involvement* dan *activist regeneration*.

Penelitian terdahulu oleh Ewa Katarzyna Drzymalska (2023) melihat bagaimana krisis iklim berpengaruh terhadap masyarakat miskin di Jakarta. Penelitian ini mengungkapkan bahwa pemerintah DKI Jakarta lebih fokus pada pembangunan yang bersifat *tourism-oriented ventures* yang mana dalam praktiknya pembangunan-pembangunan seperti ini mengesampingkan ruang hidup masyarakat miskin. Mereka masyarakat miskin terpaksa terpinggirkan oleh sistem dan harus beradaptasi kembali terkait pekerjaan dan kondisi geo-ekonomi yang berubah akibat transisi relokasi hunian yang baru dalam konteks ini rusunawa atau rusun-rusun di jakarta. Sementara itu, praktik relokasi ini menimbulkan protes. Di satu sisi, masyarakat miskin yang terdampak krisis iklim tidak adaptif terhadap perubahan iklim dikarenakan masalah finansial dan *lack of education*. Untuk menutupi celah tersebut mereka yang berpengetahuan bekerjasama dengan

volunteer, NGO, jurnalis melakukan protes mempertahankan haknya secara komunitas karena mereka tidak dianggap oleh pemerintah.

Adapun penelitian dari Fariz, Dudi, dkk (2019) menjelaskan bagaimana Strategi NGO Lingkungan dalam menangani polusi udara di Jakarta (Greenpeace Indonesia). Greenpeace melakukan strateginya dalam upaya penanggulangan polusi udara di Jakarta dengan berupaya secara maksimal dengan menggunakan strategi-strategi yang dikemukakan oleh McCormick yaitu strategi *undertaking research*, dan *campaigning and organizing public protests* dengan melakukan kampanye di depan Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan kampanye dengan pemasangan billboard. Aksi yang dilakukan bisa terbilang unik dan kreatif.

Berdasarkan dengan penjelasan latar belakang di atas, dengan demikian peneliti mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana praktik advokasi Greenpeace Indonesia yang berkaitan dengan isu kebijakan pro-lingkungan dalam momentum Pilkada DKI Jakarta 2024. Analisis diarahkan pada bagaimana advokasi tersebut merepresentasikan tiga elemen utama SIMCA, yaitu identitas sosial, emosi moral, dan keyakinan terhadap efektivitas kolektif. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Aksi Kolektif Greenpeace Indonesia dalam Mengadvokasi Keadilan Iklim pada Pilkada DKI Jakarta 2024: *Analisis Social Identity Model of Collective Action (SIMCA)*”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan yang tertera di latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Greenpeace Indonesia mengonstruksi keadilan iklim sebagai agenda advokasi lingkungan dalam Pilkada DKI Jakarta 2024?
2. Bagaimana elemen-elemen *Social Identity Model of Collective Action* (SIMCA) menjelaskan proses pembentukan aksi kolektif dalam advokasi Greenpeace Indonesia pada Pilkada DKI Jakarta 2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disusun, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Menganalisis Greenpeace Indonesia mengonstruksi keadilan iklim sebagai agenda advokasi lingkungan dalam Pilkada DKI Jakarta 2024
2. Menganalisis elemen-elemen *Social Identity Model of Collective Action* (SIMCA) menjelaskan proses pembentukan aksi kolektif dalam advokasi Greenpeace Indonesia pada Pilkada DKI Jakarta 2024

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian komunikasi dan gerakan sosial, khususnya dalam memahami aksi kolektif berbasis isu lingkungan melalui pendekatan psikologi sosial. Dengan menggunakan *Social Identity Model of Collective Action* (SIMCA), penelitian ini memperkaya literatur mengenai bagaimana identitas sosial, emosi moral, dan keyakinan terhadap efektivitas kolektif berperan dalam praktik advokasi kebijakan di konteks politik.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi organisasi masyarakat sipil, khususnya yang bergerak di bidang lingkungan, dalam memahami dinamika pembentukan partisipasi kolektif di ruang digital maupun luring. Temuan penelitian ini juga dapat menjadi bahan refleksi bagi pengambil kebijakan untuk memahami bagaimana isu keadilan iklim dimaknai dan dimobilisasi oleh masyarakat sipil, terutama dalam momentum politik seperti Pilkada. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi akademisi dan peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji hubungan antara aktivisme digital, identitas kolektif, dan advokasi kebijakan publik.

